

**PENGARUH KOMPONEN PAD, *LEVERAGE*, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten/Kota.di Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

Wulan Ayu Purnama



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**PENGARUH KOMPONEN PAD, *LEVERAGE*, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)**

Oleh:

WULAN AYU PURNAMA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen PAD, *leverage*, dana perimbangan, dan investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Alat uji data menggunakan software SPSS 21 meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan, dan uji signifikansi parameter individual.

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel retribusi daerah dan investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, *leverage*, dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, *Leverage*, Dana Perimbangan, Investasi daerah, Kemandirian Keuangan Daerah

**THE INFLUENCE OF COMPONENTS OF LOCAL REVENUE (PAD),
LEVERAGE, AND EQUALIZATION FUNDS TO LOCAL
GOVERNMENT FINANCIAL INDEPENDENCE**

(STUDY ON DISTRICTS/CITIES IN LAMPUNG PROVINCE)

BY

WULAN AYU PURNAMA

ABSTRACT

The objective of this research is to find out the influence of components of local revenue (PAD), leverage, equalization funds, and local investment to local government financial independence . The sampling method in this research is purposive sampling. Test equipment data using SPSS 21 software includes a descriptive analysis, classic assumption test, multiple linear regression, coefficient determination test, simultaneous significance test, and individual parameter significant test.

This research proves that local retribution and local investment variables have positive effect on local government financial independence, leverage, and equalization funds have negative effect on local government financial independence. While the variable tax and separated wealth management outcomes of local government have no effect on local government financial independence.

Key Words: Local tax, local retribution, local separated wealth management outcomes, leverage, equalization funds, local investment, local government financial independence.

**PENGARUH KOMPONEN PAD, *LEVERAGE*, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten/Kota.di Provinsi Lampung)**

Oleh

WULAN AYU PURNAMA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

: **PENGARUH KOMPONEN PAD, LEVERAGE, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Wulan Ayu Purnama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1211031104**

Jurusan

: **Akuntansi**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.

NIP 19750602 200012 2 001


Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt.

NIP 19790122 200912 1 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.

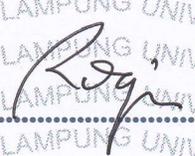
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.



Sekretaris

: Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt.



Penguji Utama : Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Akt., CA., C.PA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP. 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 November 2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Ayu Purnama

NPM : 1211031104

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH KOMPONEN PAD, *LEVERAGE*, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)” telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan merupakan hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan yang saya salin, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Acuan dari skripsi ini secara tertulis disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2016



Wulan Ayu Purnama

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Karang Anyar, Lampung Selatan, pada tanggal 26 Desember 1992, sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Afif dan Ibu Siti Roba'ah Kemala Sari.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah Taman Kanak – kanak Bhayangkari Margasari yang diselesaikan pada tahun 1999, Sekolah Dasar Negeri 06 Cengkareng Timur yang diselesaikan pada tahun 2005, SMP Muhammadiyah Margasari yang diselesaikan pada tahun 2008, SMK Negeri 1 Slawi yang diselesaikan pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh studi di Universitas Lampung penulis aktif di UKMF Rohani Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis (ROIS FEB) sebagai anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam periode 2012/2013, Wakil Ketua Badan Khusus Bimbingan Belajar Alquran periode 2013-2015 dan Pembinaan UKMF ROIS FEB periode 2014-2016.

“Orang – orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang – orang yang memperoleh kemenangan.”
(QS. At-Taubah : 20)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap. (QS. Al Insyirah 5-8)

Bismillah, terus maju membina diri dengan ilmu dan kesungguhan.
(Wulan Ayu Purnama)

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga penulis mempersembahkan karya ini untuk Sang Pemilik Jiwa (robbana atinnaa atinaa fiddunyaahasanaah, wa fil akhirati hasanaah, waqinaa 'adzaa ban naar).

Bukti cinta pada Ayahanda dan Ibunda (robbighfir lii waliwaalidayya warhamhumma kamaa robbayanii shaghiraah) serta adik – adikku dan keluarga besarku yang kusayangi, atas curahan doa disetiap detik yang dilalui disaat dekat ataupun jauh...

Saudaraku dan adik – adikku di Majelis – Majelis Ilmu dan Ukhuwah *Bismillah*, dan tetap semangat menebar kebaikan, membangun peradaban.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “Pengaruh Komponen PAD, *Leverage*, dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)” merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta staf.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., dan Bapak Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing atas waktu, saran, nasehat, semangat, dan bimbingan ilmu dalam bingkai kesabaran yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Akt., CA., CPA. selaku penguji utama, atas saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini, serta atas untaian indah nasehat kehidupan yang diberikan sebagai bekal yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Si. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan, nasihat dan bantuannya selama ini.

7. Guru-guruku di sekolah kehidupan di tiap jenjang, dan dosen-dosenku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ikhlas dalam mengabdikan dan memberikan ilmu pengetahuan, wawasan baik teori maupun praktik, bantuan, dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada staf (Pak Sobari, Mas Leman, Mbak Tina, Mas Ruli, Mpok Aini, Mas Yogi, dan staf lainnya) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini khususnya terkait dengan perihal akademik.
9. Keluargaku, Ayah (lautan kesabaran yang menenangkan), Bunda (samudra hikmah yang menguatkan), Dinda (kasih sayang yang tulus), Lintang (sinar yang tak padam), semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan memuliakan kehidupan kita semua.
10. Rekan-rekan Akuntansi 2012, terimakasih atas motivasi, dukungan, semangat dan kebersamaannya selama ini.
11. Saudara-saudaraku dan *Murobbi-murobbiku, jazakillahu khoiron katsiron* atas *ta'aruf, tafahum, dan takaful* antum semua, semoga kita selalu berada dalam kebaikan.
12. Teman seperjuanganku Intan, Sakinah, Pipit, Heni, Mafiana, Fitri, Herna, Ika, Arifa, Annisa, Tanti dan teman – teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah bersedia menemaniku berproses ke arah yang lebih baik, sungguh senyuman itu sangat mengutkan, semoga kita selalu berada di jalan yang dirahmati dan diberkahi Allah swt.
13. Special Family Edelweis, Ari, Hadera, Partiyah, Meli, Diana, Natun, Icha, Ma'rifat, Erfina, Melan, Devi, Irma, Dian, Reni, Endah, Majida, Fitri, Bella, Okti, dan Septi terimakasih karena telah bersabar dalam kebersamaan, serta tak lupa pula ucapan terimakasih kepada mbak iik atas semua bantuan, semangat, masukan, dan nasehat bagi penulis, semoga Allah membalas kebaikan mba iik dan senantiasa memuliakan kehidupan mba iik.

14. Keluarga besar ROIS FEB Unila dari masa ke masa (periode 2012/2013-2015/2016). Sahabat dan adik – adikku generasi penerus bangsa, atas kebersamaan yang mewarnai hidupku (Tetap Berjuang, ingatlah Allah dan Rasul-Nya yang akan menilai kerja keras dan kerja ikhlas antum).
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandarlampung, November 2016

Penulis,

Wulan Ayu Purnama

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SANWACANA.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Entitas.....	10
2.1.2 Otonomi Daerah.....	11
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah.....	17
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.6 <i>Leverage</i>	24
2.1.7 Dana Perimbangan.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	29
2.4 Hipotesis.....	30
2.4.1 Pengaruh Komponen PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
2.4.1.1 Pajak Daerah.....	31
2.4.1.2 Retribusi Daerah.....	31
2.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32
2.4.1.4 Investasi Daerah.....	33
2.4.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kemandirian Keuangan Daerah....	34
2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	35
III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.2 Populasi dan sampel.....	37
3.3 Metode Pengambilan Data.....	38
3.4 Variabel Penelitian.....	38
3.4.1 Variabel Dependen.....	38
3.4.2 Variabel Independen.....	39
3.4.2.1 Komponen PAD.....	39
3.4.2.2 <i>Leverage</i>	42

3.3.2.3	Dana Perimbangan.....	42
3.5	Metode Analisis data.....	43
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	43
3.5.2.2	Uji Multikolonieritas.....	45
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	45
3.5.2.4	Uji Autokorelasi.....	46
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	46
3.5.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	47
3.5.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	48
3.5.3.3	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)....	48
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.2	Analisis Data.....	50
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	50
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	53
4.2.2.2	Uji Multikolonieritas.....	55
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	57
4.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	58
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	59
4.2.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	59
4.2.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	59
4.2.3.3	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)....	61
4.2.3.4	Analisis Regresi Berganda.....	63
4.3	Pembahasan.....	64
4.3.1	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	64
4.3.2	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	66
4.3.3	Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	67
4.3.4	Pengaruh Investasi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	68
4.3.5	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..	69
4.3.5	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Keuangan Daerah.....	70
V	KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	73
5.3	Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	V
	LAMPIRAN.....	Vi

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah.....	39
4.1	Kriteria Pengambilan Sampel.....	49
4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	50
4.3	Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)</i>	55
4.4	Hasil Uji Multikolonieritas.....	56
4.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	58
4.6	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	59
4.7	Hasil Uji Statistik F.....	60
4.8	Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	61
4.9	Hasil Uji Hipotesis Regresi Linear Berganda.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Realisasi Pendapatan kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013.....	4
2.1	Pengaruh komponen PAD, Leverage, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
4.1	Hasil Uji Normalitas.....	54
4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diterapkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian direvisi menjadi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian direvisi menjadi Undang – undang Nomor. 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitasari, 2013). Otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan potensi lokal daerah tersebut.

Kedudukan pemerintah daerah terutama pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) dalam sistem otonomi daerah menjadi sangat penting karena

akan berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah daerah yang menguasai bagian daerah yang lebih sempit secara geografis dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memahami kondisi dan permasalahan wilayahnya secara detail, sehingga pembangunan daerah diharapkan akan berjalan dengan baik dan merata sampai pada wilayah – wilayah daerah.

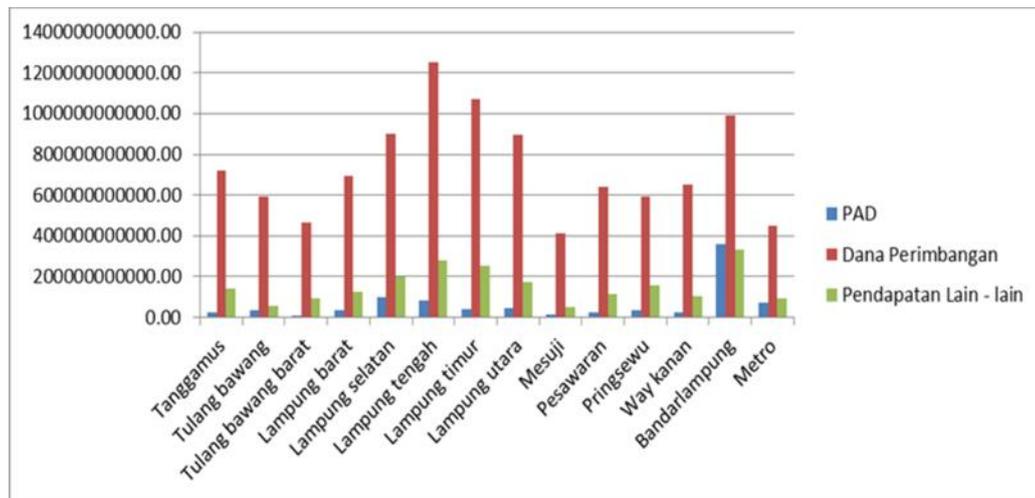
Pemberlakuan Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2004 juga dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitas daerah tersebut (Hadi, 2010). Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Halim (2007) “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Menurut Yani (2002) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan”. Bentuk penerapan undang-undang otonomi daerah adalah Pembagian wewenang dari pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada pemerintah daerah tingkat provinsi yang selanjutnya dalam lingkup yang lebih kecil yaitu pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dibawah lingkup provinsi.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi Lampung memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis karena terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dan menjadi gerbang utama Pulau Sumatera dari dan ke Pulau Jawa. Letak Lampung yang strategis ini menjadikan Lampung sebagai jalur penghubung lalu lintas darat dan laut dari provinsi-provinsi lain di pulau Sumatera menuju ke provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, sehingga idealnya letak yang strategis ini menjadikan Provinsi Lampung memiliki banyak keuntungan potensial guna mempercepat kemandirian keuangan daerah.

Disamping letaknya yang strategis secara ekonomi, Lampung juga memiliki potensi laut/bahari, sumber daya mineral, bahan tambang bukan logam, keindahan wisata dan aneka hasil bumi yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah, namun realita yang terjadi saat ini Lampung, justru menjadi daerah yang masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana perimbangan pemerintah pusat di Provinsi Lampung pada tahun 2013 masih sangat rendah. Berdasarkan data dari kementerian keuangan yang menyebutkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2013 memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih kecil bila dibandingkan dengan dana perimbangan, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013.



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (Data diolah).

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Lampung masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan keuangan daerah dan menunjukkan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya dana perimbangan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 19 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Penelitian Julitawati, dkk. (2012) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh menghasilkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya setiap 1% perubahan variabel dana perimbangan maka secara relatif akan mempengaruhi

penurunan kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,3%. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah.

Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit, oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, hal demikian menunjukkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diterima suatu daerah maka tingkat kemandirian suatu daerah semakin kecil.

Kemandirian keuangan daerah juga dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio atas laporan keuangan suatu daerah. Salah satu rasio yang digunakan adalah rasio *leverage*. Menurut Sumarjo (2010) melalui penelitiannya pada sektor publik yang menyatakan semakin besar rasio *leverage* maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil rasio *leverage* maka semakin besar kemampuan sebuah entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Pendapat tersebut mengandung artian bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin buruk tingkat kemandirian keuangan entitas, dan semakin kecil *leverage* yang

dimiliki oleh suatu entitas maka semakin baik tingkat kemandirian keuangan entitas.

Kemandirian keuangan juga berpengaruh terhadap investasi, peningkatan nilai investasi daerah berpengaruh besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap kemandirian suatu daerah. Pencapaian kemandirian suatu daerah akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2011) menyatakan bahwa investasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD sangat berperan dalam kemandirian keuangan suatu daerah. Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari investasi berguna dalam pembangunan suatu daerah. Investasi merupakan pengeluaran pemerintah untuk mendapatkan manfaat ekonomis, baik dari segi sosial maupun pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rostina (2014) tentang pengaruh belanja modal dan investasi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten kota se-Sumatera menyatakan bahwa investasi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Meningkatnya investasi di suatu daerah dapat menambah sisi pendapatan daerah yang merupakan masukan bagi daerah sehingga daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka daerah tersebut dalam sisi keuangan dikatakan baik. Pertumbuhan ekonomi ini akan menuju pada kemandirian daerah yang meningkat.

Penelitian ini akan meneliti faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah pada Provinsi Lampung yang mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Alfarsi (2015) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, pada penelitian Alfarsi (2015) hanya menggunakan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai komponen PAD. Perbedaan kedua, pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel *leverage* dan investasi daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah. Perbedaan ketiga, periode penelitian ini adalah tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Perbedaan ketiga, cakupan wilayah dari penelitian ini adalah kabupaten/kota yang berada pada Provinsi Lampung.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan dari kemandirian keuangan pemerintah daerah khususnya pada Provinsi Lampung. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi kemandirian keuangan pemerintah daerah pada setiap periode untuk tujuan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Leverage*, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah komponen PAD yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan investasi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Daerah di Provinsi Lampung?
- b. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung ?
- c. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh komponen PAD, *leverage*, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Peneliti

Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung.

b. Untuk Akademisi

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, selain itu dapat dijadikan bahan bacaan dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kemandirian keuangan daerah khususnya di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Entitas

Teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (1962) menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi (Suwardjono, 2005).

Berdasarkan pandangan tersebut, akuntansi merupakan bentuk pelaporan keuangan dari suatu kesatuan usaha, bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (*reporting entity*) yang bertanggung jawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban dari kesatuan usaha (Santoso dan Pambelum, 2008).

Putri (2014) mengungkapkan bahwa dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas tersebut telah diaplikasikan dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka entitas pelaporan dan entitas akuntansi dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP, 2010).

Berdasarkan PSAP , berikut adalah pengertian dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi:

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan keuangannya. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi keuangan kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui entitas secara lebih dalam, di mana adanya perbedaan karakteristik antar entitas yang akan memberikan perbedaan nilai dalam laporan keuangan masing-masing entitas. Laporan keuangan kemudian digunakan untuk memonitor dan membandingkan kinerja keuangan antar entitas yang sejenis (Mardiasmo, 2002).

2.1.2 Otonomi Daerah

Menurut Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada

dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*publik*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Pertimbangan yang mendasari terselenggaranya otonomi daerah adalah rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian setiap daerah, selain itu semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara termasuk persaingan daerah di suatu negara. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah.

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaan daerah. Manfaat dari pembangunan tersebut diantaranya (Haryanto, 2006):

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.
- b. Mendorong perkembangan perekonomian daerah.
- c. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang.
- d. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

f. Mendorong kegiatan investasi.

Misi utama Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan setiap daerah.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Suyono, 2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Tahun 2010 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kepada publik (Surepno, 2013). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan

disajikan sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai (Bastian, 2006).

Bastian (2006) menyebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan umum dalam pemerintah daerah menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas untuk sumber daya – sumber daya terpercaya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya *financial*.
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya.
- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi *financial* suatu entitas dan perubahan didalamnya.
- e. Menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi dan pencapaian tujuan.

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai (Bastian, 2006). Terdapat empat karakteristik pokok, yaitu:

- a. Dapat dipahami

Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan sektor publik adalah kemudahannya untuk dipahami pemakai.

b. Relevan

Informasi memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, atau masa depan.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan materialitas dan dapat diandalkan pemakainya.

d. Dapat diperbandingkan

Dapat diidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas dari suatu periode ke periode lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan unsur-unsur seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

e. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos seperti pendapatan-LO dari kegiatan operasi, beban dari kegiatan operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasi, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos seperti ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001):

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001):

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat, hal ini berdasarkan Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 A berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang “. Pungutan daerah berupa pajak dan retribusi diatur dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 dan telah diubah kembali dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun yang masuk dalam Objek Retribusi pasal 108 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

1. Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2. Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Perizinan Tertentu.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah.
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26 terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal

ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26 yang ayat 4, berbunyi lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

e. Investasi Daerah

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah “investment” (investasi) yang memiliki arti: “ Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalm suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu

seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya” (John dan Jordan Elliot Goodman, 1994).

Investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Investasi Pemerintah diatur dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yang kemudian berdasarkan undang – undang ini diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintah, yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah. Menurut Simbolon(2010) bentuk Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk Investasi surat berharga dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Investasi Surat Berharga meliputi:

- a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
- b. investasi dengan cara pembelian surat utang.
- c. Investasi ini dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.

1. Investasi Langsung.

Dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi Langsung meliputi:

1. Penyertaan Modal; dan/atau
2. Pemberian Pinjaman.

Investasi Langsung dapat dilakukan dengan cara:

1. Kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau

2. Kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Bidang Investasi Langsung meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.

Khusus pada Investasi Langsung pada bidang lainnya, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sumber dana Investasi

Menurut Simbolon (2010) bahwa sumber dana investasi pemerintah dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keuntungan investasi terdahulu;
3. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
4. Sumber-sumber lainnya yang sah.

Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan. Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan, pemerintah, dan/atau negara lain (hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali).

Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud tersebut, didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.

Pelaksanaan Investasi Langsung melalui Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing. (untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan).

2.1.6 Leverage

Istilah *leverage* lebih sering digunakan di sektor swasta. *Financial leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya secara menyeluruh (Avianti, 2000). Bagi perusahaan swasta atau lembaga yang bersifat komersial umumnya menggunakan rasio *leverage* untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur (Halim, 2007). Pada sektor publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio *leverage* ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Memang rasio *leverage* selama ini hanya digunakan di sektor perusahaan untuk mengukur komposisi sumber pembiayaan yang berasal dari kreditur dan investor. Di pemerintah daerah, rasio *leverage* ini mungkin belum merupakan rasio yang penting, dikarenakan utang daerah yang masih relatif kecil (STAN, 2007).

2.1.7 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK ini jelas menunjukkan kinerja fiskal suatu daerah. Khususnya bagi DAU dan DAK, jika persentase suatu daerah dalam penerimaan kedua dana tersebut tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa celah fiskal / kapasitas fiskal daerah tersebut rendah, yang juga menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Artinya jika DAU dan DAK suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut kurang baik. Sebaliknya jika DBH suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut baik yang mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah juga tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Jaya (2005) melakukan penelitian analisis pengaruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan investasi swasta terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja. Hasilnya bahwa APBD dan investasi swasta melalui PDRB dapat meningkatkan PAD.

Haryanto (2007) meneliti tentang Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode *Path Analysis*, variabel yang digunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, PDRB jasa pada 26 Provinsi di Indonesia menghasilkan Variabel pajak daerah (PD) dan bagi hasil pajak (BHP) memiliki hubungan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Sementara itu variabel retribusi daerah dan PDRBjasa tidak terbukti mempengaruhi kapasitas fiskal daerah secara signifikan. Mukhlis (2010) meneliti tentang peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD, dengan menggunakan variabel pajak daerah dan PAD pada Kabupaten Malang yang menghasilkan bahwa pajak daerah sangat berpengaruh terhadap PAD.

Penelitian Sumarjo (2010) yaitu mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian data karakteristik pemerintahan daerah terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue*. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah diproksikan oleh rasio efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda yang menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran (*wealth*) dan ukuran legislatif tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Hadi (2010) tentang pengaruh *likuidasi* dan *leverage* terhadap kemandirian daerah (studi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2007 di wilayah Provinsi Aceh) menghasilkan bahwa *likuidasi* dan

leverage berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kemandirian daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Erysyad (2011) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)”, menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Utami (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Tasikmalaya) Hasilnya bahwa; (1) Hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak kuat (2) Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (4) Investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian Junarwati (2013) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2010 – 2012 menghasilkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kadafi dan Wendy (2013) meneliti tentang kemandirian keuangan daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2001-2010) dengan variabel pajak daerah, retribusi daerah, PDRBjasa, bagi hasil pajak pada Pemerintah Kota Samarinda, menghasilkan variabel pajak daerah

(PD), retribusi daerah (RD), pendapatan domestik regional bruto jasa (PDRBjasa), tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. variabel bagi hasil pajak (BHP) terbukti mempengaruhi kapasitas fiskal daerah secara signifikan. Secara simultan semua variabel tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2012) tentang analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan menghasilkan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMN tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Meiliana (2014) meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandarlampung menghasilkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandarlampung baik secara simultan maupun secara parsial.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rostina (2014) tentang pengaruh belanja modal dan investasi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten kota se-Sumatera menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan investasi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

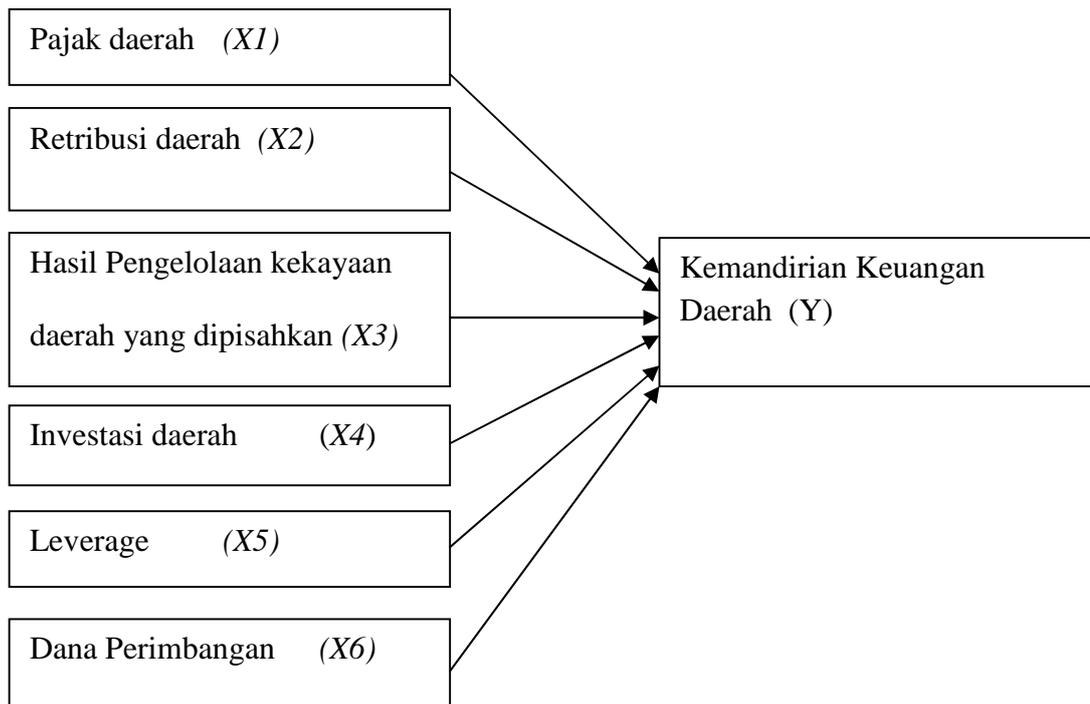
Alfarisi (2015) meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat) menghasilkan pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

penerimaan pajak daerah yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik, retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penerimaan retribusi yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik, dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Novalistia (2016) tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menghasilkan pajak daerah, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh komponen PAD yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dan *leverage*, serta dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Pengaruh komponen PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Investasi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris.

2.4.1 Pengaruh Komponen PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian Ersyad (2011) dan Muliana (2009) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika PAD meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika PAD rendah maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga rendah.

2.4.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2010) tentang peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD, menghasilkan bahwa pajak daerah sangat berpengaruh positif terhadap PAD. Kemudian hasil yang diperoleh pada penelitian Haryanto (2007) tentang kemandirian daerah sebuah perspektif dengan metode *path analysis* juga menyatakan bahwa pajak daerah (PD) dan bagi hasil pajak (BHP) memiliki hubungan signifikan positif terhadap kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Junarwati (2013) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meliana (2014) tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandarlampung menjelaskan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil dari keempat penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penerimaan retribusi yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik (Alfarisi, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh

Meliana (2014) tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandarlampung menghasilkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian Junarwati (2013) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wenny (2012) tentang analisis pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kab. dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2011) tentang analisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Provinsi Bengkulu menghasilkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah di Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Junarwati (2013) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah menyatakan

bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.1.4 Investasi daerah

Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan asset, tujuannya untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurut Rostina (2014) meningkatnya investasi disuatu daerah dapat menambah sisi pendapatan daerah yang merupakan masukan bagi daerah sehingga daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka daerah tersebut dalam sisi keuangan dikatakan baik. Pertumbuhan ekonomi ini akan menuju pada kemandirian daerah yang meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2005) tentang analisis pengaruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan investasi swasta terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja.

Menghasilkan bahwa investasi swasta melalui PDRB dapat meningkatkan PAD.

Selanjutnya, hasil penelitian Rostina (2014) tentang pengaruh belanja modal dan

investasi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten kota se-Sumatera menghasilkan bahwa investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil dari kedua penelitian menunjukkan bahwa investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4: Investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Leverage merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* merupakan perbandingan antara hutang dan modal, semakin besar hutang yang dimiliki suatu entitas maka semakin rendah kemandirian keuangan entitas tersebut. Menurut Sumarjo (2010) melalui penelitiannya pada sektor publik yang menyatakan semakin besar rasio *leverage* maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil rasio *leverage* maka semakin besar kemampuan sebuah entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Pendapat tersebut mengandung artian bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin buruk tingkat kemandirian keuangannya, dan semakin kecil *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin baik tingkat kemandirian keuangannya.

Hadi (2010) meneliti tentang pengaruh *likuidasi* dan *leverage* terhadap kemandirian daerah yang menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kemandirian daerah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Perwitasari (2010) pada sektor publik menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap kinerja.

Hasil dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut :

H5: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati, dkk 2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati, dkk (2012) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menghasilkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Alfarisi (2015) tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menghasilkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2013) tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut :

H6: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014 yang telah di audit oleh BPK.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian (Rinduan dan Lestari, 1997). Sedangkan Arikunto (2002) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai suatu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah baik pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Lampung.

3.3 Metode Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2006). Data sekunder ini terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010 sampai tahun 2014, yang telah diaudit oleh BPK. LKPD diperoleh langsung dari pihak BPK dikarenakan BPK sudah tidak mempublikasikan LKPD pada *website* resminya.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang diduga sebagai akibat dari variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2003). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan ini akan diukur melalui rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian (Halim, 2007). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah (Halim, 2007).

Rumus rasio kemandirian keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Halim (2007) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Pola hubungan tingkat kemandirian daerah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah

Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0 – 10	Sangat Kurang
10 – 20	Kurang
20 – 30	Cukup
30 – 40	Sedang
40 – 50	Baik
>50	Cukup Baik

Sumber: Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah (Munir, 2004)

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel lain atau variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen (Indriantoro dan Supomo, 2003). Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu komponen PAD, *leverage*, Dana Perimbangan, dan Investasi daerah.

3.4.2.1 Komponen Pendapatan Asli daerah (PAD)

Menurut Halim (2007) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah (X1), hasil retribusi daerah (X2), hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3), dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah (X4).

Menurut Baihaqi (2011) kontribusi adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber PAD dan komponennya, seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang dipisahkan terhadap PAD itu sendiri dan terhadap pendapatan daerah.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah (X1) adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 34 tahun 2000). Rumus yang digunakan untuk mencari kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Halim (2007) yaitu:

$$\text{Kontribusi X1} = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah (X2) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34 tahun 2000). Rumus yang digunakan untuk mencari kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menurut Halim (2007) yaitu:

$$\text{Kontribusi X2} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2007). Pengukuran kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah dihitung dengan rumus menurut Halim (2007) yaitu:

$$\text{Kontribusi X3} = \frac{\text{Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

d. Investasi daerah

Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan aset, tujuannya untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dilakukan dengan penyertaan modal berupa saham, pemerintah mendapatkan deviden dari saham tersebut. Tujuan dari penyertaan modal berupa saham ini adalah untuk mengembangkan modal pemerintah daerah. Deviden yang didapat digunakan untuk pembangunan pelayanan masyarakat dan pengelolaan kembali. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi daerah dan di perkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintah. Perhitungan investasi didasarkan pada Neraca setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

3.4.2.2 *Leverage*

Bagi perusahaan swasta atau lembaga yang bersifat komersial umumnya menggunakan rasio *leverage* untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur (Halim, 2007). Pada sektor publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio *leverage* ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Memang rasio *leverage* selama ini hanya digunakan di sektor perusahaan untuk mengukur komposisi sumber pembiayaan yang berasal dari kreditur dan investor. Di pemerintah daerah, rasio *leverage* ini mungkin belum merupakan rasio yang penting, dikarenakan utang daerah yang masih relatif kecil (STAN, 2007). Rumus perhitungan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Leverage (X5)} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

3.4.2.3 Dana Perimbangan

Pengukuran dari dana perimbangan dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. Dana perimbangan diukur dengan proksi yang sama dalam penelitian Sumarjo (2010). Pengukuran ini dipilih karena dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kota madya) dan besarnya ketergantungan pemerintah dari transfer pemerintah pusat (80%-98%) (Suhardjanto dkk, 2010).

$$\text{Dana Perimbangan (X6)} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif terdiri dari perhitungan nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2013). Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mempelajari pengumpulan, penyusunan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan suatu penelitian secara numerik (Ery dkk, 2015). Analisis deskriptif ini ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen berupa kemandirian keuangan daerah, serta variabel independen berupa komponen PAD, *leverage*, dan dana perimbangan.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian analisis regresi berganda diharuskan untuk memenuhi beberapa asumsi agar dapat digunakan atau diaplikasikan (Supriyadi, 2014). Pengujian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2013). Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013).

a. Analisis Grafik

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2013). Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Menurut Ghozali (2013) dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* (Ghozali, 2013) dengan kriteria pengujian:

- Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model adalah dengan menggunakan *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$) (Ghozali, 2013). Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 , berarti terjadi multikolonieritas, sedangkan nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , berarti tidak terjadi multikolonieritas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Gozali, 2013).

Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot. Cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot yaitu dengan melihat grafik plot, jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang membentuk pola tertentu dan teratur,

maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika gambaran pola menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y menandakan tidak adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t_{-1} (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013). Penelitian ini akan mendeteksi autokorelasi dengan *Uji Run Test*. Runt test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (Ghozali, 2013). Jika hasil test menunjukkan nilai signifikansi 0,05 maka tidak terdapat autokorelasi.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software SPSS (Statistical Product and Service Solutions)*. Dasar penggunaan linier berganda adalah skema satu variabel dependen (Y) yang berupa kemandirian keuangan pemerintah daerah yang dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen (X) yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, *leverage*, dan dana perimbangan.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y	= Kemandirian keuangan pemerintah daerah
X1	= Pajak daerah
X2	= Retribusi daerah
X3	= Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
X4	= Investasi daerah
X5	= Leverage
X6	= Dana Perimbangan
β_{123456}	= Koefisien regresi
	= Konstanta
e	= <i>Error of estimation</i>

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen, dengan nilai koefisiensi determinasi antara nol dan satu (Ghozali, 2013). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai adjusted R^2 dapat digunakan pula untuk mengevaluasi

mana model regresi terbaik, karena adjusted R^2 dapat naik dan turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2013)

3.5.3.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dalam menguji hipotesis ini digunakan kriteria pengambilan keputusan, yaitu jika nilai F menunjukkan signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya semua variabel independen serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5 % dan nilai t lebih besar dari 2 maka suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013).

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara komponen PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta leverage, dan dana perimbangan dengan kemandirian keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung periode 2010 – 2014. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Variabel retribusi daerah dan investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- b. Variabel Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten//Kota di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini disebabkan karena adanya beberapa kabupaten yang baru berdiri, sehingga pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah khususnya masih memerlukan pembenahan dan perhatian serta pembinaan khusus, baik bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat kepada Kabupaten yang baru berdiri agar dapat mengelola sumber daya atau potensi daerah secara maksimal.

- c. Variabel *leverage* dan dana perimbangan, berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut :

- a. Komponen PAD yang dipergunakan hanya pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hal ini karena variabel Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi *excluded variable* pada perhitungan SPSS, sehingga secara otomatis variabel tersebut keluar dari model penelitian.
- b. Periode penelitian yang hanya lima tahun.

5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

- a. Saran untuk Pemerintah Daerah :
 - 1) Pemerinth Daerah diharapkan untuk tetap berupaya meningkatkan penerimaan dari seluruh komponen PAD agar tercapai kemandirian keuangan daerah.
 - 2) Hendaknya Pemerintah Provinsi memberikan pelatihan khusus bagi Pemerintah Daerah yang baru berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien.
- b. Saran untuk penelitian selanjutnya :
 - 1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada komponen PAD

- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode atau jangka waktu penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memisahkan daerah – daerah yang baru berdiri dengan daerah – daerah yang sudah lama berdiri agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi daerah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi H, Salman. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan dana Perimbangan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Artikel Ilmiah*. Padang: fakultas Ekonomi Universitas Negeri padang.
- Arikunto, Suharismi. 2001. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Avianti, Ilya. 2000. Model Prediksi Kepailitan Emiten di Bursa Efek Jakarta dengan Menggunakan Indikator-indikator Keuangan. *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Baihaqi. 2011. Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 246 – 266*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ersyad, Muhammad. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat). *Skripsi*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, waskito. 2010. Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 1. Januari 2010 Hal. 29-51*. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Aceh.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Joko Tri. 2006. Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis. *Artikel*.
- Imawan, Riswanda. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 – 2012. *Jurnal Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2003. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Jaya, Amir. 2005. *Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dan Investasi Swasta Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tana Toraja*. Jurnal Adiwidia Vol 1 UKI Paulus Medan.
- Julitawati, Ebit dkk. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Vol 1 No.1 2012*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Junarwati. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010 – 2012. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2 Juli 2013 Hlm. 186-193*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Kadafi, Muhammad dan Wendy Wewisa Putra. 2013. Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2001-2010), *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke-2*, Politeknik Negeri Bali, 17-18 Mei 2013Koswara, 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Jogjakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran legislatif, *Leverage*, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal 1 (1) (2012)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meiliana.2014.Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandarlampung. *Skripsi*. Bandarlampung: Universitas lampung.
- Mukhlis, Imam. 2010. Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Seminar Regional Perpajakan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 29 April 2010*.
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Sumatera Utara. *Skripsi Medan*: Universitas Sumatera Utara.
- Munir, Dasril. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: YPAI.

- Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Novalistia, Rizka Lutfita. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Volume 2 No. 2*. Semarang: Universitas Pandanaran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. DPR RI. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Perwitrasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to The Level of accountability Disclosure of Indonesian's Local Government*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Putri, Elychia Roly. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2008 – 2012. *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 1. No 2. Semester Genap 2012/2013.
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Tesis*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Rostina. 2014. Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Kota Se-Sumatera. *Tesis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Santoso, Urip dan Pambelum, Johannes Joni. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*. No.1 Vol 04, hal: 14-33.

- Simbolon, Michael. 2010. *Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah*. Artikel.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Suhardjanto, D, Hartoko, Sri, Retnoningsih, Hilda, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Influence of Parliament Characteristics toward Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia*. Hibah Penelitian Publikasi Internasional LP2M UNS.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
- Surepno. 2013. Pengaruh Return On Equity(ROE), ukuran (SIZE), dan kemakmuran (wealth) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Suyono. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Surakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. BPFE. Yogyakarta.
- Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN.
- Undang – undang Republik Indonesia, Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara.
- Undang – undang Republik Indonesia, Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.
- Undang – undang Republik Indonesia, Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang – undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang – undang Republik Indonesia, Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah

Utami, Ayu Mita. 2012. *Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Fakultas Ekonomi, Jurnal Universitas Siliwangi.

Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol 2 No.1 September 2012*. Sumatera Selatan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MDP.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.